

FAKTOR-FAKTOR PENGAWASAN MESIN PARKIR OTOMATIS KOTA BANDUNG

AUTOMATIC PARKING MACHINE CONTROL FACTORS BANDUNG

Tati Sarihati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
sarihati.tati@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan merupakan faktor penting untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi organisasi pemerintahan. Salah satu tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir Mesin Parkir Otomatis. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala sehingga mengurangi pendapatan asli daerah Kota Bandung. Sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan kajian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan Parkir Otomatis oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung serta faktor apa yang mempengaruhi maupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengawasan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan pengecualian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan mesin parkir otomatis di Kota Bandung belum optimal. Dengan indikasi-indikasi masih minimnya fungsi pengawasan yang dilakukan, belum memadainya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan tidak langsung, serta kurangnya minat masyarakat pengguna parkir akan penggunaan mesin parkir otomatis.

Kata Kunci: Pengawasan, Mesin Parkir Otomatis, Retribusi

ABSTRACT

Supervision is an important factor to minimize the occurrence of irregularities in the implementation of government organizational functions. One of the main objectives of the supervision carried out by the Integrated Service Unit (UPT) of the Department of Transportation of the City of Bandung is to increase regional income through parking fees for automatic parking machines. In practice, there are several obstacles that reduce the original income of the city of Bandung. In connection with these conditions, a study is needed to find out and analyze how Automatic Parking supervision by the Department of Transportation of the City of Bandung and what factors influence and the efforts made to overcome the obstacles encountered. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques in this research were carried out through participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. Determination of informants was done by using purposive sampling technique. The analysis used in this study is to implement measures of

supervision consisting of direct supervision, indirect supervision and supervision based on exceptions. The results of the study explained that the supervision problem: "How much influence on the effectiveness of policy implementation in the Karawang regency Larasita program". of automatic parking machines in the city of Bandung was not optimal. With indications that the supervision function is still lacking, insufficient human resources can carry out the indirect monitoring function, as well as a lack of public interest in parking users to use automatic parking machines.

Keywords: *Supervision, Automatic Parking Machines, Retribution*

Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda empat. Dalam usaha menangani masalah tersebut, diperlukan pengadaan lahan parkir yang memadai dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat pada lahan parkir yang ada, dimana kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) haruslah seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi pendapatan asli daerah Kota Bandung bisa sangat besar dari retribusi parkir. Kebijakan retribusi di bidang pelayanan parkir yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Namun pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir beberapa tahun kebelakang masih dirasa kurang maksimal. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2010, pemerintah Kota Bandung membuat terobosan melalui mesin parkir otomatis (*e-parking*).

Mengikuti keberhasilan perkembangan model perparkiran di luar negeri, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, hingga 80 milyar rupiah untuk membeli mesin parkir sebanyak 445 buah demi tata kelola perparkiran yang lebih baik, disebar di seluruh penjuru Kota Bandung khususnya untuk perparkiran di sisi badan jalan. Penggunaan mesin parkir otomatis ini

menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, bagian yang secara spesifik mengurus mesin parkir tersebut adalah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Disebar di 57 ruas jalan namun belum berdampak baik bagi perparkiran di Kota Bandung.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah fenomena yang menunjukkan bahwa keberadaan mesin ini hampir tidak tersentuh oleh pengguna parkir, bahkan oleh petugas parkirnya sekalipun. Ketidaktahuan melatarbelakangi masyarakat pengguna parkir di badan jalan untuk tidak menggunakan mesin tersebut, meskipun beberapa diantaranya menggunakan mesin tersebut dengan seksama.

Tabel 1. Target dan Capaian Retribusi Parkir di Kota Bandung Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Peningkatan Target	Capaian (Rp)	Capaian/Target	Peningkatan
2016	9.000.000.000	-	4.800.000	53%	-
2017	140.000.000	1.555,55%	5.600.000	4%	16%
2018	118.000.000	-15,71%	6.000.000	5%	7%

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2018

Dari tabel diatas pada tahun 2016 sebelum mesin parkir otomatis di pergunakan di Kota Bandung capaian target yang didapatkan sebesar 53% meski belum dikatakan baik namun hampir dari setengah dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung dapat terpenuhi, selanjutnya kenaikan secara signifikan di kolom target pada tahun 2017 yang semula hanya 9 milyar Rupiah naik ke angka 140 milyar

Rupiah itu dikarenakan pada tahun tersebut mesin parkir otomatis di Kota Bandung sudah diaplikasikan, meski ada kenaikan di segi capaian dari tahun sebelumnya, namun ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, begitupun dengan yang terjadi pada tahun 2018.

1. Tinjauan Teoritis

Pengawasan adalah suatu fungsi manajemen yang mengharuskan pimpinan suatu organisasi terlibat langsung dalam kontrol terhadap suatu aturan atau kebijakan yang diterapkan, istilah pengawasan menurut bahasa Indonesia sendiri berasal dari kata “awas” yang berarti aktifitas mengawasi atau mengamati sesuatu secara teliti. Secara umum pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Lebih lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomparasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, maupun problematika organisasi yang lain, kemudian dilakukan langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Terry (2011 : 110) mengartikan pengawasan sebagai : “Pengawasan dapat dan seharusnya digunakan untuk meningkatkan hubungan yang menguntungkan dan bersifat positif. Pengawasan adalah dalam bentuk

memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sesuai rencana dan untuk mengantisipasi persoalan menjadi serius.” Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Setiap pimpinan dalam proses pengawasan tentu mengharapkan semuanya berjalan dengan sempurna. Pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pengukuran kinerja apakah efektif atau tidak. Pengawasan tentu juga memiliki syarat atau ciri yang baik agar pengawasan dapat berjalan lancar.

G.R Terry dan L.W Rue (2011: 235) menyebutkan ciri-ciri yang diharapkan dari pengawasan yaitu: 1. Jenis pengawasan harus sejalan dengan persyaratan dari kegiatan. 2. Penyimpangan yang memerlukan koreksi harus segera diidentifikasi. 3. Pengawasan harus sebanding dengan pembiayaannya. Pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh pimpinan yang menggunakan metode pengawasan yang disebutkan oleh Terry (2011 : 195) sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin untuk memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, observasi di tempat (*on-the-spot observation*), dan laporan di tempat (*on-the-spot report*).

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung bisa diartikan juga dengan pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan, laporan ini dapat berupa lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan ataupun hasil yang telah dicapai

3. Pengawasan Berdasarkan Pengecualian

Pengawasan Berdasarkan Pengecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dengan cara kombinasi antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung oleh pimpinan.

Sedangkan menurut Handoko (2003:379) mengatakan bahwa “sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan untuk dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan juga merupakan kegiatan penilaian terhadap organisasi/ kegiatan dengan tujuan agar organisasi/ kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Hasibuan (2013:363) ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.

3. Kesalahan-kesalahan

bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, pimpinan dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan sehingga sistem pengawasan memungkinkan pimpinan mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini termasuk ke dalam jenis

penelitian deskriptif kualitatif¹ dimana dalam penelitian ini peneliti mencoba menggambarkan suatu keadaan yang terjadi di lapangan atau sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian secara objektif khususnya yang terjadi pada kegiatan fungsi pengawasan yang dilakukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan mengenai kondisi yang terjadi melalui kata-kata yang telah tersusun. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam (Indepth Interview). Dengan pendekatan tersebut diharapkan peneliti dapat memahami situasi dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Faktor Pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dirasa masih belum cukup optimal. Pengawasan dengan pimpinan langsung mendatangi lokasi dimana terdapat mesin parkir otomatis masih jauh dari harapan, sesuai pernyataan kepala bidang lalu lintas dan perparkiran, pengawasan secara langsung hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu. Hal ini berarti fungsi pengawasan secara langsung belum bekerja secara baik, mengingat dari banyak dan lokasi dari mesin parkir otomatis jika hanya dilakukan sekali dalam satu minggu kurang maksimal, terkecuali jika pimpinan hanya mendatangi lokasi-lokasi yang dirasa cukup strategis terkait penggunaan mesin parkir otomatis, namun itu dirasa kurang menyeluruh.

Faktor kedua adalah pengawasan tidak langsung. Kondisi dilapangan terkait penggunaan mesin parkir otomatis, pengawasan secara tidak langsung ini berjalan lebih baik di bidang lalu lintas dan perparkiran, karena, dari laporan diatas dapat dilihat jika pengawasan secara tidak

langsung memberikan hasil yang lebih menyeluruh dibandingkan ketika pengawasan dilakukan secara langsung. Kelemahan dari fungsi pengawasan yang kedua ini adalah proses yang harus dilakukan memakan waktu cukup lama, mengingat jumlah staf yang diperintah terbatas, saat dilapanganpun mereka tidak bisa secara langsung untuk mengambil keputusan, sehingga itu akan memakan waktu yang cukup lama.

Faktor terakhir adalah pengawasan berdasarkan pengecualian, fungsi pengawasan ini dilakukan saat ada hal-hal yang mendesak yang harus segera ditanggapi oleh pimpinan selaku pemegang kebijakan, fungsi pengawasan ini adalah kombinasi dari kedua fungsi pengawasan yang sebelumnya. Pengawasan berdasarkan pengecualian ini pun juga dirasa belum memberikan dampak yang maksimal, terbukti dengan adanya mesin parkir otomatis di beberapa tempat yang kondisinya terbengkalai dan rusak dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Beberapa temuan di lapangan yang diakibatkan oleh belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, diantaranya :

1. Kurangnya kesejahteraan terhadap petugas parkir di lapangan yang menjadi ujung tombak perparkiran di Kota Bandung.
2. Metode pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang dianggap menjadi penghambat, karena tidak semua pengguna mesin parkir otomatis memiliki uang elektronik, khususnya pengguna kendaraan bermotor roda dua.
3. Pengawasan yang dilaksanakan belum menyeluruh, hal ini berdampak pada masih terjadinya praktik parkir liar yang menyebabkan kerugian terhadap

¹ Creswell, John W. 2014. *Research Design*
Pendekatan Metode Kualitatif,

Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar

- pemerintah Kota Bandung, khususnya dari sektor retribusi parkir.
4. Tidak ada laporan secara lisan maupun tulisan dari petugas di lapangan kepada Dinas maupun Pemerintah Kota Bandung terkait mesin parkir otomatis
 5. Banyak mesin parkir otomatis di beberapa ruas jalan yang tidak berfungsi dan rusak sehingga parkirpun kembali ke cara manual tanpa menggunakan mesin parkir
 6. Temuan penelitian menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang bersifat khusus yaitu pengawasan dilaksanakan secara digital. Dalam upaya Dinas Perhubungan Kota Bandung bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung menempatkan sejumlah kamera pengawas di beberapa titik ruas jalan di Kota Bandung, hal ini bertujuan untuk mengawasi sejumlah titik perparkiran di Kota Bandung yang diduga menjadi biang kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir, dimana dikawasan itu kerap terjadi praktik parkir liar yang sering dilakukan oleh oknum petugas parkir dengan pihak-pihak tertentu yang tentu saja merugikan pemerintah kota Bandung.
 7. Temuan berikutnya adalah adanya fungsi pengawasan teknis, hal ini dilakukan karena banyaknya mesin parkir otomatis yang kondisinya rusak, Dinas Perhubungan Kota Bandung menghususkan perbaikan terhadap mesin parkir otomatis yang rusak, namun, dalam pelaksanaannya, perbaikan ini belum dirasa optimal, karena di beberapa titik mesin parkir yang rusak masih belum mendapatkan penanganan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Hambatan Pengawasan Mesin Parkir Otomatis

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tentunya banyak ditemui kendala maupun hambatan yang tentunya berpengaruh

terhadap pendapatan yang masuk khususnya pada retribusi parkir di badan jalan. Berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, dewasa ini tentunya dalam penyelenggaraan perparkiran kini mulai terlihat adanya ikut campur tangan pihak-pihak lain yang kini mulai sadar akan potensi yang dihasilkan melalui sector perparkiran khususnya dimana terdapat tingginya potensi parkir pada suatu daerah ataupun areal tertentu. Selain daripada keterlibatan pihak lain hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran pengguna jasa parkir dalam membayar retribusi parkir.

Upaya Yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan

1. Menambah Jumlah Sumber Daya Manusia

Melihat masalah yang timbul dari kurangnya jumlah staf yang ada, langkah yang dapat dilakukan oleh bidang lalu lintas dan perparkiran adalah penambahan jumlah staf kepada Dinsa Perhubungan, hal ini akan berdampak kepada lebih banyaknya staf yang dapat ditugaskan melakukan fungsi pengawasan secara tidak langsung, ini akan membantu mempercepat fungsi pengawasan, karena banyaknya staf yang dimiliki akan membuat fungsi pengawasan menjadi lebih optimal dan dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya.

2. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Hasil dari belum terjalannya komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan petugas parkir dilapangan adalah tidak optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa petugas penjaga parkir di lapangan adalah salah satu ujung tombak terkait keberhasilan penerapan kebijakan mesin parkir otomatis di Kota Bandung, maka dari itu, komunikasi antara pemerintah dan pelaksana lapangan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi langkah yang dapat ditempuh oleh keduanya, banyaknya sarana komunikasi

yang dapat menjadi jembatan antar keduanya dapat digunakan untuk menunjang komunikasi yang baik, agar fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dapat berjalan dengan baik.

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh bidang lalu lintas dan perparkiran dirasa belum cukup baik, pimpinan datang langsung ke tempat dimana mesin parkir itu diterapkan, melaksanakan inspeksi secara langsung, sehingga dapat mengetahui kondisi di lapangan. Namun kegiatan pengawasan langsung seperti ini akan lebih baik jika sering dilakukan oleh pimpinan yang akan berdampak pada keberhasilan pengawasan mesin parkir otomatis
 - b. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh bidang lalu lintas dan perparkiran sudah dilaksanakan dengan baik, instruksi yang diberikan oleh pimpinan mampu dijalankan dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, namun kurangnya jumlah staf yang dapat bertugas menjadi kendala dalam segi waktu, mengingat banyaknya mesin parkir otomatis yang tersebar di Kota Bandung yang berbanding terbalik dengan jumlah staf akan menimbulkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan.
 - c. Pengawasan berdasarkan pengecualian, fungsi pengawasan yang terakhir juga belum dirasa memberikan dampak yang baik, terbukti dari banyaknya mesin

parkir yang rusak dan belum diperbaiki, fungsi pengawasan ini adalah fungsi pengawasan yang memungkinkan pimpinan untuk datang ke lapangan memeriksa kondisi apabila ada keadaan yang mendesak.

2. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan mesin parkir otomatis di Kota Bandung, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang tidak dapat dihindari. Faktor pendukung dalam pengawasan mesin parkir otomatis ini adalah adanya aturan kebijakan yang jelas, ini menjadi hal yang dirasa baik karena apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terkait fungsi pengawasan yang akan dilaksanakan telah diatur dalam aturan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandung. Sementara faktor penghambat dari pengawasan mesin parkir otomatis di Kota Bandung adalah minimnya sumber daya manusia, banyaknya lokasi mesin parkir otomatis yang tersebar berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga berdampak pada lamanya proses pengawasan yang dilakukan dan akan membuat pengambilan keputusanpun memakan waktu yang cukup lama pula.

5.2. Rekomendasi

1. Disarankan kepada pemerintah, baik pemerintah Kota Bandung maupun Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk segera membuat Peraturan Daerah tersendiri untuk mesin parkir otomatis ini, tidak menggunakan Perda yang lama.
2. Adanya kejelasan sanksi terhadap pengguna parkir yang tidak menggunakan mesin parkir otomatis, mengingat penggunaan mesin parkir

otomatis oleh masyarakat masih rendah.

3. Bagi pihak pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung, hendaknya melakukan inspeksi-inspeksi langsung secara rutin ke lokasi penerapan mesin parkir otomatis dalam melaksanakan fungsi pengawasan langsung, hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung.
4. Memberikan imbalan atau kesejahteraan terhadap petugas penjaga parkir dilapangan, hal ini akan meningkatkan semangat dari pelaksana di lapangan.
5. Menjaga komunikasi dengan petugas di lapangan akan membantu pihak Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan.
6. Koordinasi hendaknya dilakukan antara Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mengurangi penyimpangan dalam pengawasan mesin parkir otomatis ini. Atau dengan membuat satu tim gabungan antara ketiga instansi tersebut agar fungsi pengawasan terhadap mesin parkir otomatis ini lebih berjalan maksimal.
7. Hendaknya ada peninjauan ulang terhadap petugas lapangan yang ditempatkan di titik-titik keberadaan mesin parkir otomatis. Hal ini tak terlepas dengan konflik kepentingan yang dimiliki oleh tiap orang dari petugas lapangan. Mengingat bukan tidak mungkin praktik liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu melibatkan petugas parkir yang tersedia, karena fungsi pengawasan yang belum berjalan dengan baik, hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbuat hal-hal yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2007. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- , 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang, Marihot A. 2004. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta : Gajah Mada University press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Terry, George.R, dan Leslie.W. Rue. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*, Terjemahan : G.A. Ticoalu Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Samudra, Azhari A. 2005, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta : Hecca Publishing
- Warpani. 1985. *Parkir di Pusat kota Bandung*. Bandung : ITB.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 1994, Tentang Tata

Cara Parkir Kendaraan Bermotor
Di Jalan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah
UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah